

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Hingga akhir tahun 2025, pergerakan inflasi di Kabupaten Manggarai Timur secara umum sejalan dengan tren provinsi NTT yang mencatatkan inflasi *year-on-year* (y-on-y) sebesar **2,39%**.

- **Andil Terbesar:** Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menyumbang kenaikan indeks harga tertinggi, mencapai **3,46%**.

- **Faktor Pendorong:** Kenaikan permintaan musiman menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru) menjadi pemicu utama kenaikan harga di pasar-pasar lokal seperti Borong.

Berdasarkan pemantauan harga di lapangan, berikut kondisi komoditas utama pada akhir Desember 2025:

- **Beras:** Harga cenderung stabil namun tetap tinggi di kisaran Rp14.000 - Rp16.000/kg tergantung kualitas. Upaya penyaluran cadangan pangan oleh Pemkab membantu meredam lonjakan ekstrem.
- **Cabai & Bawang:** Mengalami lonjakan tajam di minggu ke-3 dan ke-4 Desember akibat kendala distribusi dan berkurangnya pasokan dari petani lokal karena faktor cuaca.
- **Daging Ayam & Telur:** Mengalami kenaikan harga sekitar 5-10% dari bulan sebelumnya karena peningkatan konsumsi akhir tahun.
- **Barang Lainnya & Jasa:** Tarif transportasi darat dan angkutan logistik tetap stabil, namun sektor jasa perawatan pribadi mencatatkan kenaikan indeks signifikan di level provinsi.

TPID Kabupaten Manggarai Timur mengidentifikasi beberapa risiko yang perlu diwaspadai pada awal tahun 2026:

- **Cuaca Ekstrem:** Risiko kegagalan panen atau hambatan distribusi logistik melalui pelabuhan akibat cuaca buruk di wilayah NTT.
- **Kenaikan Tarif Jasa:** Penyesuaian tarif beberapa kelompok jasa non-pangan yang biasanya terjadi di awal tahun anggaran.
- **Ketersediaan Pasokan:** Penurunan stok gabah petani sebelum memasuki masa panen raya di triwulan berikutnya.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

**Geografi Kepulauan:** Biaya logistik tinggi karena ketergantungan pada transportasi laut dan udara. Cuaca ekstrem sering menghambat distribusi barang dari pulau Jawa atau Sulawesi ke pulau Flores.

**Infrastruktur Jalan:** Akses jalan dari sentra produksi (desa) ke pasar utama (kota) yang belum optimal meningkatkan biaya angkut dan risiko kerusakan barang (terutama hortikultura).

**Defisit Komoditas Tertentu:** Banyak daerah belum mandiri untuk komoditas pemicu inflasi

seperti bawang merah, cabai, dan telur ayam, sehingga harga sangat bergantung pada stok dari daerah pengirim.

**Rantai Pasok yang Panjang:** Terlalu banyak perantara (tengkulak) dari petani hingga ke konsumen akhir yang menyebabkan margin harga menjadi tinggi.

**Komitmen Kepala Daerah :** Kurangnya komitmen dan peran Kepala Daerah sebagai Ketua TPID menyebabkan sulitnya koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan TPID di daerah

**Optimalisasi Dana BTT:** Masih ada keraguan di tingkat daerah untuk mencairkan **Belanja Tidak Terduga (BTT)** guna subsidi transportasi atau operasi pasar karena kekhawatiran terkait aspek pemeriksaan hukum.

**Sinkronisasi Data:** Perbedaan data stok pangan antar instansi (Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perdagangan) terkadang menghambat pengambilan keputusan yang cepat.

### 3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah pada tahun 2025–2026 berfokus pada penguatan sinergi antara pusat dan daerah melalui **Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)**. Strategi utama yang diterapkan tetap berpedoman pada kerangka **4K**, yang didukung oleh langkah-langkah konkret mingguan untuk menjaga inflasi 2025 tetap dalam kisaran sasaran  $2,5 \pm 1$ .

Pemerintah daerah mengoptimalkan empat pilar utama dalam operasional harian TPID:

- **Ketersediaan Pasokan:** Memperkuat Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), terutama komoditas beras, serta mendorong program swasembada pangan lokal sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025.
- **Keterjangkauan Harga:** Melaksanakan **Gerakan Pangan Murah (GPM)** dan Operasi Pasar secara rutin untuk menjaga daya beli masyarakat.
- **Kelancaran Distribusi:** Melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan untuk mempermudah akses dari daerah penghasil ke pasar - pasar.
- **Komunikasi Efektif:** Melakukan pemantauan harga mingguan dan rilis data Indeks Perkembangan Harga (IPH) oleh BPS sebagai dasar pengambilan kebijakan cepat.

### 4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- **Ketersediaan Pasokan:** Fokus pada penguatan stok pangan, terutama beras. Di Kabupaten Manggarai Timur, penyaluran cadangan pangan terbukti efektif meredam kenaikan harga beras.
- **Keterjangkauan Harga:** Pelaksanaan **Gerakan Pangan Murah (GPM)** dan Operasi Pasar secara masif di berbagai daerah dinilai berhasil menjaga daya beli masyarakat.
- **Kelancaran Distribusi:** Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk subsidi ongkos angkut logistik sangat krusial bagi daerah untuk menekan biaya transportasi pangan.

**Komunikasi Efektif:** Edukasi belanja bijak membantu menekan ekspektasi inflasi di tingkat konsumen.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pemerintah daerah direkomendasikan untuk menjalankan enam upaya konkret secara disiplin:

- 1. Monitoring Harga:** Melakukan pemantauan harga harian di pasar-pasar utama.
- 2. Sidak Pasar:** Mengawasi distributor dan pedagang untuk mencegah penimbunan stok.
- 3. Subsidi Transportasi:** Mengalokasikan dana APBD atau Dana Desa untuk menanggung ongkos transportasi logistik guna menekan harga di tingkat konsumen.
- 4. Gerakan Menanam:** Menggalakkan kembali program menanam komoditas pemicu inflasi (seperti cabai dan bawang) di pekarangan rumah atau lahan kosong.
- 5. Realisasi BTT:** Mengoptimalkan penggunaan **Belanja Tidak Terduga (BTT)** untuk intervensi harga mendadak.
- 6. Koordinasi Mingguan:** Aktif mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Kemendagri secara rutin.